

PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA ATAS TIDAK TERPENUHINYA UPAH MINIMUM UNTUK PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (OMNIMBUS LAW)

Kadek Ayang Peramachyntia

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : ayangperamachyntia@gmail.com

Abstract

The research entitled Employer's Accountability for Non-Fulfillment of Minimum Wage for Workers Based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Omnibus Law). Wage is the right reward from businessman for worker/laborer for a job or service that has been or will be performed. However, in receiving wages by workers/laborers it is not in accordance with the minimum wage that has been regulated by each region. The regulation regarding the minimum wage has been regulated in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in the Omnibus Law which contains several laws in it. The existence of rules regarding the provision of wages is certainly expected to fulfill the rights of workers/laborers. This research was obtained using a normative method with qualitative data analysis where this method emphasizes the aspects of understanding and collecting data using document study guidelines.

Keywords : Wages, Workers/Labourers, Employer Accountability, Minimum Wage Regulations

Abstrak

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Tidak Terpenuhinya Upah Minimum Untuk Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban pengusaha dan peraturan mengenai upah minimum bagi pekerja/buruh. Upah merupakan hak pekerja/buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Namun dalam penerimaan upah oleh pekerja/buruh tidak sesuai dengan upah minimum yang telah di atur setiap wilayahnya masing-masing. Pengaturan mengenai upah minimum telah di atur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Omnibus Law yang memuat beberapa Undang-Undang di dalamnya. Adanya aturan mengenai pemberian upah tentu di harapkan hak dari pekerja/buruh terpenuhi. Penelitian ini diperoleh menggunakan metode normatif yang dilakukan analisis data kualitatif dimana metode ini menekankan pada aspek pemahaman dan pengumpulan data menggunakan pedoman studi dokumen.

Kata Kunci : Upah, Pekerja/Buruh, Pertanggungjawaban Pengusaha, Peraturan Upah Minimum